



Dua Pejabat Kota Diperiksa



FOTO-FOTO: MIFTAHUDDIN/RADAR BALI



DIPERIKSA: Mantan Kasubag Kerja Sama dan Fasilitas DPRD Denpasar Gede Wirakesuma (foto kiri) dan Kabag Perundang-undangan Gusti Made Patra saat diperiksa terkait dugaan korupsi Perdin di Kejari Denpasar, Senin (25/5).



Kami tanyakan, data yang empat kardus itu, ditanyakan ke Patra (Kabag Perundang-undangan, Gusti Made Patra, Red) satu - satu."

SYAHRIR SAGIR, Kasi Intel Kejari Denpasar

Kasus Dugaan Korupsi Perdin

DENPASAR - Dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar digeber lagi Senin kemarin (25/5). Tim Jaksa kejar Denpasar memeriksa dua orang saksi dalam kasus ini. Mereka adalah pejabat di Pemkot Denpasar. Yang pertama adalah Kabag Perundang

- undangan yang merupakan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di DPRD Kota Denpasar Gusti Made Patra dan Mantan Kasubag Kerja Sama dan Fasilitas DPRD Kota Denpasar yang saat ini Kepala UPT Pengelola Gedung Sewaka Dharma Gede Wirakesuma.

Untuk Patra diperiksa di ruang Jaksa Luga Herlianto. Ada juga Kadek Wira Atmaja yang ikut memeriksa Patra. Sedangkan untuk Wirakesuma diperiksa di Posko,

sebelah selatan parkir Kejari. Dia diperiksa oleh adalah Jaksa Denny Iswanto.

Dua orang ini diperiksa mulai pukul 09.00. Mereka sempat diberikan waktu makan siang, pukul 12.00. Namun hanya Wira yang memanfaatkan rehat makan siang. Sedangkan Patra tidak memanfaatkan rehat makan siang. "Ini minta lanjut pemeriksaannya," jelas Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir ■

► **Baca Dua...** Hal 31

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 21



Adi Arnawa Dipanggil Terkait PHR

■ DUA...

Sambungan dari hal 21

Syahrir Sagir terus memantau pemeriksaan. Bahkan sesekali masuk ke ruang Jaksa Luga, kemudian kembali menuju posko walaupun posisinya cukup jauh.

Syahrir mengatakan mereka ditanya seputaran perjalanan dinas (perdin). Dia mengatakan untuk Wira lantaran sempat menjabat di DPRD Kota Denpasar yang membidangi tugas perjalanan

dinas. Sedangkan Patra memang bertanggung jawab, lantaran melalui Peraturan Walikota (Perwali) dia ditunjuk menjadi PPTK tahun 2014. "Satu persatu data yang kami dapatkan. Kami tanyakan, data yang empat kardus itu, ditanyakan ke Patra satu - satu," ungkap Syahrir.

Syahrir mengatakan proses pemeriksaan dilakukan lebih mendetail. Agar nantinya bisa lebih cepat, tidak memanggil ulang lagi. Dia mengatakan ada waktu 2 sampai 3 minggu

untuk menuntaskan proses penyelidikan. "Sehingga nanti bisa dilakukan gelar perkara lagi, untuk selanjutnya bisa naik ke penyidikan," jelasnya. "Bahkan besok (hari ini, Red) kami juga akan melakukan pemeriksaan," katanya.

Seperti berita sebelumnya, kasus ini berawal dari temuan BPK terkait perjalanan dinas pada APBD Pemkot Denpasar 2013. Dalam temuan tersebut ditemukan ada kelebihan membayar sebesar Rp 565 juta lebih.

Kasus PHR

Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Badung yang ditangani Kejati Bali juga terus bergulir. Bahkan untuk mengusut kasus tersebut, kemarin Kejati Bali kembali melakukan pemeriksaan. Salah satu pejabat yang diperiksa adalah Kadispenda Badung Adi Arnawa. Adi Arnawa adalah Balon (Bakal Calon) Bupati Badung, yang melamar kendaraan ke PDIP.

Adi Arnawa sebenarnya di-

panggil pukul 10.00, namun baru sampai di Kejati Bali pukul 11.45. Dia diperiksa dua Jaksa, yaitu Made Tangkas dan Ketut Yasa. Mantan Camat Kuta Utara dan Kepala Satpol PP, ini diperiksa di ruang pemeriksaan lantai dua Kejati Bali. "Sebenarnya memang pukul 10.00 kami panggil namun baru datang ini," kata Tangkas di sela-sela pemeriksaan.

Usai pemeriksaan, Adi Arnawa keluar lewat depan. Awak media terkecoh yang menunggu di belakang. Dia mengaku hanya

membawa data terkait dengan PHR (Pajak Hotel dan Restoran). "Saya hanya membawa data saja, data PHR," ungkapnya.

Sedangkan menurut Jaksa Made Tangas, Adi Arnawa membawa data PHR Badung tahun 2014. Yang di dalamnya ada data lengkap terkait dengan pendapatan PHR Badung. "Adi Arnawa membawa data itu saja, kemudian kami tanya-tanya terkait tugas pokok dan fungsi. Dia mengatakan tidak paham terkait dengan alokasi PHR Badung yang

disisihkan untuk Kabupaten lain. Karena ada SKPD lain termasuk Bappeda," kata Tangkas.

Dia juga mengatakan, memang pemeriksaan singkat. Lantaran Adi Arnawa mengaku tidak terlibat. Namun jika nanti ada kesaksian yang menyatakan Adi Arnawa memang terlibat dalam proses penyisihan PHR akan dipanggil lagi. "Nanti kami panggil lagi, jika ditemukan ada penyisihan PHR yang melibatkan Kadispenda," imbuhnya. (art/yes)



Mesadu DPRD Bali Petani Batuampar



UNTUT HAK: Puluhan petani asal Batuampar, Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, saat mendatangi Gedung DPRD Bali, pada Senin kemarin (25/5).

Buntut Penjarahan Tanah oleh Pemkab Buleleng

DENPASAR – Puluhan petani pemilik lahan di Batuampar, Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, kemarin (25/5) mendatangi Gedung DPRD Bali. Mereka memperjuangkan lahan mereka yang diduga dijarah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Mereka diterima Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya. Hadir pula Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, BPN Buleleng. Kepada Dewan Renon, para petani ini mengeluhkan bahwa lahan milik mereka terancam digusur. Mereka juga terancam kehilangan tempat tinggal. Kondisi ini dinilai sangat ironis, mengingat para petani tersebut

telah mendiami lahan dimaksud turun temurun. Mereka juga mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 45 hektare, yang kini bermasalah. "Kami sangat sedih, tanah kami diserobot. Kami terancam tidak lagi menjadi pemilik lahan, tetapi hanya menjadi penggarap di tanah kami sendiri," ungkap salah seorang petani pemilik lahan di Batuampar, dalam pertemuan ini. Makanya, ia meminta DPRD Bali secara kelembagaan, untuk memperjuangkan nasib mereka. Mereka mendorong, agar persoalan ini ditempatkan di masalah hukum murni, dan tidak dipolitisasi.

Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, berjanji akan mengkaji persoalan ini. Ia juga meminta pihak-pihak terkait, agar tidak memolitisir kasus ini, sehingga tidak menjadi blunder.

Sebab, petani memiliki sertifikat hak milik asli atas nama Nyoman Parwata (2 bidang) dan Ketut Salin."

IGK KRESNA BUDI

Anggota Komisi I DPRD Bali

Sementara anggota Komisi I DPRD Bali IGK Kresna Budi mendorong Presiden Joko Widodo melalui menteri terkait, untuk turun tangan secara langsung menyelesaikan kasus ini. Ia berpandangan, dalam kasus ini telah terjadi tindakan makar serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, jelas-jelas lahan tersebut adalah milik para petani. "Itu milik petani, tapi dirampas. Itu makar, itu namanya pelanggaran HAM." Ada unsur perampasan di sana, lantaran hak pengelolaan (HPL) justru tak ada objeknya. "Sebab, petani memiliki sertifikat hak milik asli atas nama Nyoman Parwata (2 bidang) dan Ketut Salin. Landasan hukumnya juga jelas, yakni SK Mendagri Tahun 1982. Tetapi kenapa tiba-tiba saja terbit HPL? Ini adalah perampasan hak petani," tegasnya. Perwakilan BPN Buleleng, pada kesempatan ini mengaku masih menunggu hasil koordinasi petani dengan Pemkab Buleleng. BPN juga sepakat, penyelesaian masalah ini di jalur hukum, dan jauh dari unsur politik. (pra/djo)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 24



Setahun, Kontribusi Aset Pemprov Rp 7 Juta

NEGARA - Aset Pemprov Bali yang berada di wilayah Jembrana dinilai masih belum dikelola secara maksimal, sehingga kontribusinya masih sangat kecil. Temuan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Panitia Khusus (pansus) aset DPRD Bali, kemarin (25/5) kontribusi aset yang dimiliki pemprov hanya Rp 7 juta per tahun.

Temuan ini membuat kaget Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Wayan Gunawan. Kontribusi dari 131 bidang tanah yang sudah ada surat izin mengelola (SIM) aset provinsi Bali tersebut dinilai terlalu sedikit dibanding jumlah aset yang bisa dikelola untuk

lahan pertanian yang dimiliki pemerintah provinsi." "Nilai ini sangat kecil karena terlalu rendah,"katanya.

Tata kelola dan manajemen aset harus lebih dimaksimalkan sehingga menjadi jelas antara hak dan kewajiban. Pasalnya, setiap tahunnya aset pemerintah provinsi Bali ini menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK), terutama terkait antara jumlah aset yang dimiliki dengan kontribusi yang diperoleh. Jumlah aset yang dimiliki pemerintah provinsi sangat banyak, namun pendapatan dari retribusinya sangat kecil. "Kenapa jadi temuan BPK, karena

NJOP dan retribusi nyamplir," terangnya.

Sekda Jembrana Gede Gunadnya kecilnya kontribusi itu dinilai wajar karena acuan dalam penentuan besaran tarif dan retribusi SIM yaitu Peraturan Gubernur Bali No 41 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan No 3/2011 tentang Retibusi Jasa Usaha. Dimana untuk Jembrana masuk aset kelas IV dengan klasifikasi tegakan besaran tarifnya Rp 10,00. sedangkan sawah hanya Rp 45,00. perolehan retribusi itu kemudian dibagi dengan pembagian 40 persen masuk kas daerah yang 60 persen masuk kas provinsi. (bas/gup)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 29